

## STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Elya Isti Afziah<sup>1</sup>, Siti Raudah<sup>2</sup>, Barkatullah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [elyaistiafziah@gmail.com](mailto:elyaistiafziah@gmail.com)

### ABSTRAK

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi para penyandang disabilitas mental atau gangguan kejiwaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan seperti belum adanya penanganan khusus, terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di tempat umum, tidak adanya patroli khusus untuk memantau keberadaan orang dengan gangguan jiwa, dan jumlah petugas yang masih belum memadai untuk penanganan dalam cakupan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang luas. Fenomena tersebut kemudian diangkat sebagai dasar terwujudnya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan faktor yang memengaruhi strategi tersebut dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif-deskriptif. Guna mendapatkan data, dilakukan beberapa cara yaitu dengan melalui tahap observasi, tahap wawancara, dan arsip dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang berjumlah 13 orang. Setelah data-data terhimpun, maka dilanjutkan dengan analisis yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Kemudian, diuji kredibilitas data melalui perpanjangan hasil pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan mengadakan *member check*.

Pada hasil akhir penelitian ditemukan bahwa Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal. Tujuh dari enam indikator tergolong belum optimal, di antaranya yaitu indikator faktor internal, faktor eksternal, perencanaan program, sumber daya manusia, pelaksanaan program, monitoring kinerja dan evaluasi program. Sementara indikator identifikasi kebutuhan termasuk ke dalam kategori sudah optimal. Terbatasnya jumlah petugas dalam penanganan ODGJ, belum adanya pelatihan khusus penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk petugas, kurangnya koordinasi lintas sektor, anggaran yang situasional. Pendekatan bersifat reaktif merupakan faktor penghambat. Sedangkan untuk faktor pendukung mencakup adanya prosedur asesmen kebutuhan dan adanya dukungan dari keluarga. Dalam hal strategi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya tidak terlepas dari peran kolaboratif seluruh pihak. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial untuk mengadakan pelatihan penanganan ODGJ dan menambah personil, kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial agar mengusulkan anggaran terencana serta memperkuat kerja sama lintas sektor, kepada Staf dan TKSK untuk meningkatkan monitoring, pendampingan, komunikasi, serta penjangkauan lapangan.

**Kata Kunci:** Strategi, Penanganan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

### ABSTRACT

*Handling of People with Mental Disorders is one of the duties of the Social Service of Hulu Sungai Utara Regency in order to improve social welfare services, especially for people with mental disabilities or mental disorders. However, in its implementation, there are several problems such as the lack of special handling for people with mental disorders who roam in public places, the absence of special patrols to monitor the presence of people with mental disorders, and the number of officers is still inadequate for handling the wide area of Hulu Sungai Utara Regency. This issue was then raised as the basis for this research, with the objective of identifying the Social Affairs Department's strategies for handling individuals with mental disorders in Hulu Sungai Utara Regency.*

*The methodology used in this study is qualitative-descriptive. To obtain data, several methods were employed: observation, interviews, and archiving documentation. Interviews were conducted with 13 informants. After data collection, analysis proceeded, including data reduction, presentation, drawing*

*conclusions, and verification. Data credibility was then tested through extended observation, increased diligence, triangulation, and member checking.*

*The final research findings revealed that the Social Services Agency's strategy for handling people with mental disorders in Hulu Sungai Utara Regency remains suboptimal. Seven of the six indicators were classified as suboptimal, including internal factors, external factors, program planning, human resources, program implementation, performance monitoring, and program evaluation. Meanwhile, the needs identification indicator was categorized as optimal. The lack of specialized training, the lack of a dedicated data collection system for classifying people with mental disorders, and the lack of cross-sectoral coordination are inhibiting factors. Supporting factors include the existence of needs assessment procedures and family support. The strategy for handling people with mental disorders in Hulu Sungai Utara Regency relies heavily on the collaborative role of all parties. It is recommended that the Head of the Agency conduct specialized training on the handling of people with mental disorders for officers directly involved in the field so that they have sufficient knowledge and skills in handling people with mental disorders. In addition, it is also recommended that the Head of the Social Rehabilitation Division at the Social Service of Hulu Sungai Utara Regency create a special data collection system that contains all data on people with mental disorders in Hulu Sungai Utara Regency and be more active in increasing cooperation and coordination between staff in his field and other agencies.*

**Keywords:** *Strategy, Handling, People with mental disorders*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi di mana kebutuhan fisik, psikis, dan sosial individu tercukupi agar kehidupan yang layak dapat terwujud serta dapat mengembangkan diri, sehingga peranan sosialnya dapat tercapai dengan baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan jaminan kesejahteraan sosial dalam bentuk program maupun pelayanan sosial untuk menangani permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara turut berperan dalam memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat biasanya tidak terlepas dari keberadaan kelompok rentan atau yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada tahun 2022, Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat memiliki 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental/jiwa. Orang dengan gangguan jiwa atau yang disingkat dengan ODGJ adalah individu dengan gangguan fungsional psikis yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor biologis (genetik) maupun kondisi kesehatan fisik yang dapat memperburuk kesehatan mental, faktor psikologis seperti trauma dan stres berlebihan, serta faktor sosial seperti diskriminasi, kemiskinan dan kurangnya dukungan dari keluarga. Gangguan jiwa dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, perasaan, dan menghambat aktivitas serta interaksi dengan individu lain. Adapun ciri-ciri penderita gangguan jiwa sebagai berikut (Anthony, 2022):

1. Perubahan tidur dan nafsu makan yang drastis;
2. Perubahan suasana hati, seperti emosi yang cepat berubah, meningkatnya perasaan tertekan dan mudah tersinggung;
3. Penarikan diri dari kehidupan sosial dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati;
4. Penurunan fungsi yang tidak biasa, di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sosial;
5. Masalah penurunan dalam berkonsentrasi, ingatan atau pemikiran logis dan ucapan yang sulit dijelaskan;

6. Apatis, yakni hilangnya inisiatif atau keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas apapun;
7. Munculnya perasaan samar-samar terputus dari diri sendiri atau lingkungan sekitar; perasaan tidak nyata; dan
8. Pemikiran yang tidak logis.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengesahkan regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Regulasi tersebut dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjamin terlindungi serta terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, masih banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum terpenuhi haknya seperti mendapatkan perlakuan diskriminasi, pasung, bahkan ditelantarkan hingga berkeliaran.

Fenomena Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di tempat umum tentunya sudah bukan hal yang baru bagi masyarakat di berbagai daerah. ODGJ yang berkeliaran biasanya merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki keluarga, atau memiliki keluarga namun ditelantarkan/sengaja dibiarkan berkeliaran. Di satu sisi, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hak dan kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat umum. Stigma negatif mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan kapan saja dapat berperilaku meresahkan atau sampai melukai orang lain membuat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kerap kali dihindari oleh masyarakat setempat. Fenomena ini juga masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama di tempat-tempat umum seperti jalanan dan pasar.

Ditinjau dari data penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah yang memperoleh layanan per kecamatan dari tahun 2023-2024 mengalami kenaikan. Hal ini menandakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya dalam melakukan penanganan secara merata di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akan tetapi, meningkatnya jumlah pemerlu layanan mengindikasikan peningkatan jumlah penyandang gangguan jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari data tersebut selisih total Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tertangani di tahun 2023 dengan 2024 mencapai 30 orang lebih dengan jumlah tertinggi tercatat di Kecamatan Amuntai Tengah.

Melalui pengamatan awal, ditemukan beberapa fenomena masalah pada Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Belum adanya penanganan khusus terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di tempat umum, seperti pada Pasar Amuntai, di mana diketahui terdapat enam orang penyandang gangguan jiwa yang sampai saat ini masih sering berkeliaran bahkan menimbulkan keresahan di lingkungan pasar.
2. Belum adanya patroli khusus untuk memantau keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), saat ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya melakukan pemantauan terhadap keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ketika penyaluran bantuan sosial, sehingga penanganan pada akhirnya keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berpotensi menimbulkan gangguan di lingkungan masyarakat sering kali luput dari deteksi dini. Penanganan yang diberikan bersifat reaktif atau menunggu adanya laporan dari masyarakat.
3. Jumlah petugas yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum memadai melakukan penanganan dalam cakupan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terbilang cukup luas.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Oran Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Penelitian ini fokus pada Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Oran Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori Manajemen Strategi menurut Wheelen T.L & Hunger J.D (1996) dalam (Rusdiana, 2023) di mana terdapat empat elemen dalam proses manajemen strategi, yaitu:

1. Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)
2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)
3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)
4. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Penelitian ini berangkat dari penelitian serupa yang relevan dengan judul **“STRATEGI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PASCA REHABILITASI PADA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”** ditulis oleh Miky Mulyanus (2022) Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dilatarbelakangi oleh banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan berkeliaran di lingkungan masyarakat, sehingga muncul pandangan negatif dari masyarakat, terutama ODGJ yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Pada Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam hal jumlah penyandang gangguan kejiwaan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dinas Sosial setempat telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada. Salah satunya adalah dengan merehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan melakukan rujukan perawatan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terdekat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah tahapan setelah klien dengan gangguan jiwa dinyatakan sembuh. Hal ini dikarenakan data diri klien seringkali tidak tersedia, sehingga menyulitkan pihak Rumah Sakit untuk proses pemulangan. Temuan pada penelitian ini adalah strategi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rehabilitasi sudah dijalankan. Akan tetapi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih menjumpai permasalahan ketika melaksanakannya. Adapun permasalahan tersebut, yaitu sebagian data diri klien ODGJ beserta informasi terkait pihak keluarga tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan sulitnya proses assessment serta pemulangan klien setelah dinyatakan stabil. Sementara itu, rehabilitasi lanjutan akan dilakukan kepada klien tanpa identitas dan informasi terkait pihak keluarga yang tidak lengkap.

Penelitian lainnya, dengan judul **“PERANAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEDIRI”** oleh Lailatul Fitriyah (2021) Universitas Brawijaya Malang. Dilatarbelakangi oleh permasalahan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan yang disebabkan adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satu diantaranya adalah penyandang gangguan jiwa (ODGJ). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kediri, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum terpenuhi haknya. Stigma yang melekat dan dipercaya oleh masyarakat menyebabkan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cenderung disembunyikan oleh pihak keluarga. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Temuan pada kajian ini adalah Peran Dinas Sosial dalam upaya peningkatan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri masih belum optimal karena sarana dan prasarana kesehatan jiwa yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kediri masih belum memadai, belum meratanya jaminan dan perlindungan sosial secara menyeluruh, serta masih

diperlukannya peningkatan dalam hal pemberdayaan sosial.

Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terutama yang masih berkeliaran tidak dapat terlepas dari peran Dinas Sosial setempat selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Diperlukan strategi agar tujuan dalam penanganan tersebut dapat terwujud dengan maksimal. Strategi adalah benang merah di antara kegiatan organisasi (Igor Ansoff dalam Murhadi (2024:57)). Pada lingkungan organisasi, strategi dipahami sebagai serangkaian rencana atau langkah-langkah berkepanjangan yang dirancang dengan memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang agar misi organisasi dapat tetap dijalankan meski terjadi transformasi pada kondisi di lapangan. Strategi merupakan langkah-langkah yang dirancang dan dijalankan dengan tujuan yang jelas (Hit, dkk (1997) dalam Rusdiana (2023:39)). Tujuan strategi di dalam organisasi tentunya agar memungkinkan organisasi beradaptasi dengan lingkungan dalam kondisi apapun sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Siagian dalam Pahlevi dan Musa (2023)). Selain tujuan, strategi juga pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut (1) mengkomunikasikan suara maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain; (2) menghubungkan atau mengaitkan kekuatan/keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya (3) memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekaligus menyelidiki adanya peluang baru; (4) menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak daripada yang digunakan saat ini; (5) mengkoordinasikan dan mengerahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan; (6) menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu Assauri (2019:7). Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

## METODE

Penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Karya Manuntung Kota Raja, Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia, 71452. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan, populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis (Fiantika et al., (2022:87)). Deskriptif yaitu menggambarkan kondisi yang apa adanya sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Data dikumpulkan berdasarkan hasil dari beberapa sumber seperti catatan observasi, catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada 13 informan. Ditentukan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Zuchri Abdussamad, 2021). Setelah melakukan tahapan wawancara, observasi dan pengumpulan dokumentasi, maka data selanjutnya dianalisis dengan melalui reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## PEMBAHASAN

### A. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Optimal atau tidaknya suatu strategi dapat dilihat dari bagaimana organisasi memajemen strateginya. Strategi akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dikelola dengan baik. Menurut Wheelen T.L & Hunger J.D (1996) dalam (Rusdiana, 2023) terdapat empat elemen dalam proses manajemen strategi, yaitu:

## 1. Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Pengamatan lingkungan (*environmental scanning*) merupakan tahapan paling awal dalam manajemen strategi. Agar strategi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, peting untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis baik di dalam maupun di luar instansi.

### a. Faktor Internal

Faktor internal meliputi segala sesuatu yang bersumber dari dalam organisasi. Adapun faktor internal dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi belum optimal karena belum terkelola dengan maksimal. Ditinjau dari masih terkendalanya dalam hal pengalokasian anggaran serta ketidaksesuaian kompetensi petugas di mana tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian khusus dalam menanggapi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi segala sesuatu yang bersumber dari luar organisasi. Adapun faktor eksternal dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara maupun hasil observasi belum optimal karena dukungan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa masih minim disebabkan oleh stigma negatif yang masih melekat sampai saat ini, belum adanya pemantauan rutin dalam bentuk patroli dikarenakan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik, serta tidak tersedianya fasilitas khusus untuk menampung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi merupakan tahapan penyusunan rencana mengacu pada hasil analisis lingkungan yang selanjutnya akan dilaksanakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk tercapainya tujuan organisasi. Tahapan perumusan strategi meliputi identifikasi kebutuhan dan perencanaan program.

### a. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan proses pemetaan kebutuhan khusus dari kelompok yang menjadi sasaran program. Adapun identifikasi kebutuhan dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sudah optimal karena proses identifikasi kebutuhan bagi penyandang gangguan jiwa telah terlaksana secara sistematis.

### b. Perencanaan Program

Perencanaan program ialah aktivitas penyusunan tujuan jangka panjang dalam suatu organisasi dengan memuat langkah-langkah preventif guna mencapai tujuan organisasi dengan maksimal. Adapun perencanaan program dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi masih belum optimal. Meskipun secara administratif terdapat dokumen perencanaan (RENSTRA), namun implementasinya belum menunjukkan adanya strategi pencegahan, penjangkauan aktif, atau sistem pendataan yang kuat khusus untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terutama yang berkeliaran di tempat umum.

### 3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi adalah wujud nyata dari rencana-rencana panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pelaksanaan strategi berkaitan erat dengan kegiatan dan kontribusi sumber daya manusia yang terlibat.

#### a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi strategi, sumber daya manusia menjadi pondasi utama yang berperan sebagai kunci dari tercapainya tujuan organisasi. Adapun sumber daya manusia dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara maupun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan terbatasnya jumlah petugas yang tersedia.

#### b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan selaras dengan perencanaan, sebagai sebuah usaha untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan mereka yang mengalami masalah kejiwaan (ODGJ). Adapun pelaksanaan program dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara maupun hasil observasi belum berjalan optimal karena meskipun sudah mengacu pada SOP, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih bersifat reaktif berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat.

### 4. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Tujuan dari evaluasi dan pengendalian adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dijalankan sekaligus melakukan penyesuaian jika memang dibutuhkan. Pengawasan yang teliti adalah fondasi utama untuk evaluasi yang akurat. Namun, evaluasi tetap memerlukan tahapan dan cara tersendiri agar benar-benar bisa memberikan perbaikan bagi program tersebut. Proses evaluasi ini memegang peranan vital dalam menjamin program terlaksana sesuai aturan yang ada, dan para pelaksana menjalankan kewajibannya secara optimal demi mewujudkan tujuan program.

#### a. Monitoring Kinerja

Monitoring kinerja ialah aktivitas menilai seberapa baik petugas pelaksana melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun monitoring kinerja dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara maupun hasil observasi belum berjalan optimal karena meskipun telah terlaksana dan petugas telah menjalankan tugasnya sesuai instruksi, namun monitoring belum dilakukan secara menyeluruh. Tantangan seperti kurangnya waktu dan sumber daya seringkali menjadi penghalang untuk melakukan pengawasan yang komprehensif.

#### b. Evaluasi Program

Evaluasi program tidak terlepas dari proses penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan program. Adapun evaluasi program dalam Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada hasil wawancara maupun hasil observasi belum berjalan optimal karena meskipun evaluasi sudah dilakukan, namun masih bersifat umum dalam lingkup

Rehabilitasi Sosial dan belum secara khusus menilai program ODGJ. Ditambah dengan belum tersedianya ruang terbuka untuk menampung masukan dari pihak luar.

## **B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

### **1. Faktor Pendukung**

Di bawah ini merupakan beberapa faktor-faktor yang mendukung Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

#### **a. Adanya prosedur asesmen kebutuhan yang dilakukan secara langsung di lapangan**

Salah satu faktor pendukung dalam strategi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah prosedur asesmen. Asesmen dilakukan secara langsung oleh petugas dengan melakukan kunjungan ke tempat tinggal klien ODGJ sebagai salah satu upaya pengumpulan data.

#### **b. Adanya dukungan dari pihak keluarga**

Partisipasi pihak keluarga dan kesediaan untuk terbuka dalam hal informasi mengenai keadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu faktor yang mendukung lancarnya proses penanganan. Dalam proses identifikasi kebutuhan, informasi yang lengkap dan data yang akurat akan turut mempermudah petugas dalam penentuan jenis layanan yang diperlukan oleh klien nantinya. Selain itu, dukungan dari pihak keluarga dibutuhkan sebagai support system sehingga ODGJ tidak merasa dikucilkan.

### **2. Faktor Penghambat**

Di bawah ini merupakan beberapa faktor-faktor yang menghambat Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

#### **a. Belum adanya pelatihan khusus penanganan ODGJ untuk petugas**

Pelatihan turut mempengaruhi kemampuan petugas. Dalam hal penanganan ODGJ, tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarang terutama bagi petugas yang berhadapan langsung di lapangan. Petugas belum pernah dibekali pelatihan teknis yang memadai tentang bagaimana menangani ODGJ jika sewaktu-waktu mereka mengamuk atau kemampuan untuk melakukan pendekatan psikologis terhadap orang yang menderita gangguan jiwa.

#### **b. Kurangnya koordinasi lintas sektor**

Koordinasi antar instansi sangat penting guna mewujudkan keberlanjutan program. Pelaksanaan strategi penanganan ODGJ dapat terhambat disebabkan kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial dengan instansi terkait lainnya seperti satpol pp.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada temuan penelitian terkait Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditarik kesimpulan berupa: Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum berjalan optimal. Ditinjau dari belum optimalnya hasil setiap indikator. Dari delapan indikator, tujuh di antaranya belum optimal, sementara satu indikator sudah optimal. Indikator pertama, faktor internal

dikategorikan belum optimal karena masih terdapat kendala dalam pengalokasian anggaran, ketidaksesuaian latar belakang bidang studi petugas, belum tersedianya tenaga ahli yang khusus bertugas untuk menangani klien ODGJ meskipun sudah tersedia standar operasional prosedur. Indikator kedua, faktor eksternal dikategorikan belum optimal terlihat dari masih minimnya dukungan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, belum adanya pemantauan rutin dalam bentuk patroli dikarenakan koordinasi lintas sektor belum berjalan dengan baik, serta ketiadaan fasilitas khusus untuk menampung ODGJ terlantar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator ketiga, identifikasi kebutuhan dikategorikan optimal karena Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjalankan proses identifikasi kebutuhan bagi penyandang gangguan jiwa secara sistematis. Indikator keempat, perencanaan program dikategorikan belum optimal karena belum ada strategi pencegahan, pemantauan kepada ODGJ yang berkeliaran dan penjangkauan aktif ke wilayah terpencil. Indikator kelima, sumber daya manusia dikategorikan belum optimal karena jumlah petugas di Bidang Rehabilitasi Sosial yang masih terbatas dengan jumlah tiga orang dan tidak hanya fokus menangani permasalahan ODGJ saja. Indikator keenam, pelaksanaan program dikategorikan belum optimal karena meskipun sudah mengacu pada SOP, penanganan ODGJ masih bersifat reaktif berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat. Indikator ketujuh, monitoring kinerja dikategorikan belum optimal karena meskipun telah terlaksana dan petugas telah menjalankan tugasnya sesuai instruksi, namun monitoring belum dilakukan secara menyeluruh. Indikator kedelapan, evaluasi program dikategorikan belum optimal karena meskipun evaluasi sudah dilakukan, namun masih bersifat umum dalam lingkup Rehabilitasi Sosial dan belum secara khusus menilai program ODGJ. Ditambah dengan belum tersedianya ruang terbuka untuk menampung masukan dari pihak luar. Disamping itu, peneliti menemukan bahwa Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung: Pertama, adanya prosedur asesmen kebutuhan bagi klien dengan gangguan jiwa. Kedua, dukungan dari pihak keluarga. Faktor penghambat: Pertama, terbatasnya jumlah petugas dalam penanganan ODGJ. Kedua, belum adanya pelatihan khusus penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk petugas. Ketiga, kurangnya koordinasi lintas sektor. Keempat, anggaran yang situasional. Kelima, pendekatan bersifat reaktif. Untuk Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan kepada Kepala Dinas agar mengadakan pelatihan khusus mengenai penanganan ODGJ bagi petugas yang terlibat langsung di lapangan agar petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menangani ODGJ. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial diharapkan agar dapat mengusulkan alokasi anggaran penanganan ODGJ yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Anggaran sebaiknya tidak lagi bersifat situasional, melainkan direncanakan dengan memperhitungkan kemungkinan kebutuhan mendesak serta mencakup biaya operasional, transportasi, dan logistik lapangan. Dengan demikian, penggunaan anggaran bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menghambat pelaksanaan penanganan ODGJ merencanakan penanganan yang tepat sesuai kebutuhan di setiap wilayah dan lebih proaktif aktif meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara staf di bidangnya dengan instansi terkait guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial dan TKSK, disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan penjangkauan lapangan, tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Serta mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi proaktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan patroli rutin, penjangkauan langsung ke wilayah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Anthony (2022) *Warning Signs of Mental Illness*.
- Assauri, S. (2019) *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. Depok: Rajawali Pers.
- Fiantika, F.R. et al. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st edn. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriyah, L. (2021) *PERANAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEDIRI*. Universitas Brawijaya Malang.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Mulyanus, M. (2022) *STRATEGI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PASCA REHABILITASI PADA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU*. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Murhadi, W.R. (2024) *Manajemen Strategi*. Surabaya: DPPI Universitas Surabaya.
- Pahlevi, C. and Musa, M.I. (2023) *Manajemen Strategi*. Makassar: Intelektual Karya Nusantara.
- Rusdiana, A. (2023) *Manajemen Strategik Berbasis Keunggulan Kompetitif*. 1st edn. Bandung: Yrama Widya.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Zuchri Abdussamad (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.